

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Artikel

- Abdullah, R., Mutaqin, R. N., & Yasin, A. (2022). Indonesia-China trade performance in the RCEP forum. *International Foundation for Research and Development*, 14(3(J)), 33-41. [https://doi.org/10.22610/jebs.v14i3\(j\).3306](https://doi.org/10.22610/jebs.v14i3(j).3306)
- Aminudin, K., & Yasin, M. (1991). Pendekatan socio-yuridis terhadap kasus kecelakaan kerja, setelah 20 tahun UU No. 1 Tahun 1970. *Badan Penerbit FHUI*, 21(2), 109-109. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no2.335>
- Andilas, D., Devi, & Yanggana, L. A. (2017). Pelaksanaan program tol laut PT Pelayaran Nasional Indonesia. 4(1), 1-1. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v4i1.36>
- Arjuni, L. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran dikaitkan dengan legalitas pengelolaan kapal cepat Kartini 1 jalur Jepara-Karimunjawa-Semarang. *Diponegoro University*, 4(2), 19-19. <https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.677>
- Aryani, Y., Desy, & Rahdriawan, M. (2016). Kajian peluang kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Diponegoro University*, 11(4), 413-413. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.11551>
- Djufri, A. T. (2020). *Perjanjian kerja laut berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia*. Jurnal Iqtisaduna, 2(3), 14. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/18589/10417>. Accessed June 3, 2021, at 14:24.
- Djumadi. (2010). *Hukum perburuhan perjanjian kerja*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Djumadi. (2002). *Hukum perburuhan perjanjian kerja*. PT. Grafindo Persada.
- Estimo, T., & Emeliza. (2020). Ship to academe, seafaring to teaching: Seafarer teachers in maritime higher education institutions in the Philippines. *Science Publishing Group*, 5(2), 44-44. <https://doi.org/10.11648/j.her.20200502.12>
- Fahrojih, I. (2016). *Hukum perburuhan: Konsepsi, sejarah, dan jaminan konstitusional*. Setara Press.
- Hatta, M., Mochtar, D. A., & Az, M. G. (2021). Prinsip tanggung jawab pengangkut pada pengangkutan laut di Indonesia. *Universitas Merdeka Malang*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5853>
- Herlambang, H., & Pratama. (2012). Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pola hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan berbasis outsourcing guna mencapai pola ideal hubungan kerja di PT. Suksesindo. *Diponegoro University*, 8(1), 58-58. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12417>

- Hulu, S. (2018). Pertanggungjawaban pidana atas tindakan diskresi pejabat pemerintahan yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang. *Diponegoro University*, 47(2), 167-167. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>
- Husni, L. (2010). Perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri (kajian yuridis terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan penempatan dan perlindungan TKI). *Badan Penerbit FHUI*, 40(2), 270-270. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.220>
- Ikhwan, F. (2016). *Hukum perburuhan: Konsepsi, sejarah, dan jaminan konstitusional*. Setara Press.
- Jannah, F., Purwangka, F. P., & Iskandar, B. H. (2018). Kecukupan akomodasi kapal purse seine (studi kasus: KM Berkah Melimpah di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta). *14(1)*, 52-52. <https://doi.org/10.14710/ijfst.14.1.52-62>
- Kuahaty, S. (2014). Pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum kontrak di Indonesia. *20(2)*, 64-64. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.328>
- Manihuruk, S. P. (n.d.). *Perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal, nakhoda, dan anak buah kapal* [Unpublished thesis]. Universitas Diponegoro.
- Matindas, W., Rudolf, & Villanueva, K. J. (2017). Pulau-pulau terluar dan batas wilayah nasional status delimitasi batas wilayah nusantara. *Badan Penerbit FHUI*, 33(1), 134-134. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1377>
- Muhiddin, N. (2016). *Efektivitas perjanjian kerja laut terhadap keselamatan anak buah kapal*. Jurnal Al-Daulah, 5(1), 75.
- Muntaha, M. (2018). Perlindungan hak asasi tenaga kerja wanita lokal pada perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara. *Diponegoro University*, 46(3), 228-228. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.228-238>
- Nugroho, A., Rohman, M. A., & Rohmah, N. (2019). Terlepasnya jangkar kiri pada saat berlabuh jangkar di anchorage area Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. *9(2)*, 2359-2375. <https://doi.org/10.46484/db.v9i2.102>
- Nur, W., Hidayat, M., & Rahman, N. (2021). Pengaruh kompetensi, budaya organisasi dan disiplin terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar. *2(3)*, 471-482. <https://doi.org/10.37476/nmar.v2i3.2394>
- Pranyoto, P., & Kundori, K. (2022). Optimalisasi penerapan ISPS Code berdasarkan tingkat keamanan dalam menunjang keamanan kapal dan pelabuhan. *24(1)*, 1-7. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v24i1.262>
- Purwendah, K. (2020). Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal tanker dalam sistem hukum Indonesia. *2(1)*, 7-26. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.81>

- Putra, A., & Valentino, C. (2017). Urgensi klausula definisi dalam perjanjian kerja. *Udayana University*, 39(01), 61-61. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p05>
- Rikardo, D., Saleh, S., & Bulqiest, C. (2021). Optimalisasi pengawasan crew terhadap proses bongkar muat pada kapal tanker MT Gamkonora. 38-43. <https://doi.org/10.56943/ejmi.v3i1.27>
- Rosnaeni, R., & Buchori, I. (2017). Analisis pemilihan moda transportasi penduduk Kelurahan Pabuaran-Cibinong pasca pengoperasian kereta komuter (KRL) jalur Nambo (Cibinong) – Citayam – Jakarta. *Diponegoro University*, 13(4), 503-503. <https://doi.org/10.14710/pwk.v13i4.18268>
- Ruslan, R., & Auliah, D. (2023). Pengesampingan pasal dalam perjanjian oleh para pihak dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. 3(3), 273-273. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1592>
- Sagala, B., & Budiman. (2017). Kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Badan Penerbit FHUI*, 16(2), 153-153. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no2.1197>
- Siregar, S., Harmayani, H., Apdilah, D., & Ginting, C. L. (2023). Sosialisasi kebijakan dan peranan hukum di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3(1), 45-50. <https://doi.org/10.47709/dst.v3i1.2370>
- Suharnata, S., Shahrullah, R. S., & Nurlaily, N. (2023). Problematika ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 sebagai perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. 10(2), 144-164. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5650>
- Suriyana, N. (2021). Determinasi kepuasan kerja dan kinerja pegawai: Motivasi, komunikasi, dan gaya kepemimpinan (literature review manajemen sumberdaya manusia). 2(1), 389-412. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.558>
- Suwardi, R. (2020). Tanggung jawab hukum pengelola barang dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara. 4(1), 42-42. <https://doi.org/10.32884/pkp.juridis.v4i1.238>
- Syahrul, S. (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di sektor informal. 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.21143/uks.v7i1.1032>
- Tanjung, R. (2016). Tanggung jawab perdata pengangkut barang di laut berdasarkan hukum internasional dan nasional. 26(2), 74-82. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol26.no2.234>
- Wibowo, A. (2019). Aspek hukum pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Udayana University*, 16(3), 97-97. <https://doi.org/10.24843/jih.2019.v16.i03.p07>
- Wijayanti, A. (2011). *Menggugat konsep hubungan kerja*. Lubuk Agung.
- Wikanda, A., Kurniawan, F., & Fadillah, S. (2018). Kinerja pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Diponegoro University*, 9(2), 101-113. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.23974>

Wirjono Prodjodikoro, R. (1981). *Hukum perdata tentang persetujuan- persetujuan tertentu*. Penerbit Sumur Bandung.

Wulandari, S. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Badan Penerbit FHUI*, 35(1), 63-63. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no1.1908>

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1601 huruf d.

### **Pasal-pasal**

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Adrian, anak buah kapal (Mualim I), (2021, October 15).